

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Natuna

2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Natuna

2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Natuna, 2020

ISBN : 978-623-5845-05-0
No. Publikasi : 21030.2122
Katalog : 4101004.2103 :
Ukuran Buku 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 67 hal

Naskah

BPS Kabupaten Natuna

Penyunting

BPS Kabupaten Natuna

Desain Kover

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Ilustrasi Kover

canva.com

Diterbitkan oleh/Published by:

©BPS Kabupaten Natuna

Dicetak oleh/Printed by:

Percetakan Rizky Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab Umum

Wahyu Dwi Sugianto

Penyunting

Lia Oktavera

Naskah

Lia Oktavera

Numawiya

Arif Racmatillah Amin

Pengolah Data

Lia Oktavera

Numawiya

Arif Racmatillah Amin

Gambar Kulit dan Tata Letak

Lia Oktavera



KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Natuna 2020 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Natuna antar waktu dan perbandingannya antar jenis kelamin. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan beberapa kementerian/lembaga terkait tema yang disajikan. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Publikasi ini menyajikan indikator kesejahteraan rakyat dengan beberapa aspek dan sesuai dengan ketersediaan data. Diantaranya aspek kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan serta lingkungan sosial lainnya.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Ranai, November 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Natuna



Wahyu Dwi Sugianto



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I. Kependudukan	1
BAB II. Kesehatan dan Gizi	13
BAB III. Pendidikan	19
BAB IV. Taraf dan Pola Konsumsi	37
BAB V. Perumahan dan Lingkungan	45
BAB VI. Kemiskinan	55
BAB VIII. Sosial Lainnya	63

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Beserta Rasio Jenis Kelamin, 2020	5
Tabel 1.2. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Natuna, 2020.....	6
Tabel 1.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna, 2020.....	7
Tabel 2.1. Angka Kesakitan Kabupaten Natuna menurut Jenis Kelamin, 2020	16
Tabel 2.2. Persentase Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Kabupaten Natuna, 2020.....	18
Tabel 2.3. Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Karakteristik, 2020.....	20
Tabel 2.4. Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Karakteristik dan Jenis Imunisasi, 2020.....	21
Tabel 2.5. Jumlah Fasilitas Kesehatan di kabupaten Natuna, 2020	23
Tabel 3.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Natuna Tahun 2020	32
Tabel 3.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Natuna Tahun 2020	33
Tabel 3.3. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Natuna Tahun 2020	34
Tabel 4.1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Natuna (Rupiah), 2019-2020	

.....	39
Tabel 4.2. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Natuna (rupiah), 2019- 2020	39
Tabel 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Natuna, 2019-2020	48
Tabel 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Natuna, 2019-2020	50
Tabel 6.1. Perkembangan Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2016-2020	58
Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima , 2020	64
Tabel 7.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial, 2020.....	65
Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Jenis Aset, 2020	65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna 2016 – 2020	8
Gambar 1.2. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2020	10
Gambar 2.1. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Natuna (tahun), 2011-2020	14
Gambar 2.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Natuna Berdasarkan Jenis Kelamin.	15
Gambar 2.3. Perkembangan Angka Kesakitan Kabupaten Natuna (tahun), 2018-2020	17
Gambar 2.4. Perkembangan Penduduk yang Berobat Jalan dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2018-2020 ..	18
Gambar 2.5. Distribusi Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dan Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Natuna, 2020	22
Gambar 3.1. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Natuna, 2010-2020	30
Gambar 3.2. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Natuna, 2010-2020	31
Gambar 4.1. Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Natuna (persen), 2020	38
Gambar 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, 2020 ...	51

Gambar 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Natuna, 2005-2020	56
Gambar 7.1. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2020	63

<https://natunakab.bps.go.id>

1

KEPENDUDUKAN



Rasio Jenis Kelamin
Penduduk Kabupaten
Natuna 2020

105,77



Angka Ketergantungan Penduduk
Kabupaten Natuna 2020

49,03



Kepadatan penduduk
Kabupaten Natuna 2020

40,56

penduduk per km²



→ **34,12%**

penduduk Kabupaten
Natuna berdomisili di
Kecamatan Bunguran
Timur

→ Midai adalah
kecamatan dengan
penduduk terpadat,
diikuti Bunguran
Timur dan Suak
Midai



Pertumbuhan penduduk dalam jumlah yang besar akan menimbulkan dampak tersendiri bagi suatu negara. Pada negara yang sudah maju, jumlah penduduk yang besar akan disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sedangkan di negara yang sedang berkembang, jumlah penduduk yang besar secara kuantitatif tidak disertai dengan kualitas yang memadai. Ini mengakibatkan penduduk menjadi beban pembangunan disegala aspek baik pembangunan secara ekonomi dan pembangunan secara sosial. Suatu bangsa yang tidak mampu mengembangkan keterampilan, ilmu pengetahuan secara efektif dalam perekonomian nasional akan berdampak terhadap pembangunan yang tanpa makna (Todaro, 2012).

Kependudukan merupakan hal penting dalam suatu pembangunan karena penduduk merupakan suatu sasaran pembangunan. Sehingga untuk menciptakan kualitas penduduk perlu melalui sumber daya yang ada dengan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas.

Pemerintahan pada hakikatnya dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Penduduk yang sejahtera tercermin dari kehidupan sosial ekonomi yang berkualitas. Untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi yang berkualitas, pemerintah melakukan pembangunan.

Salah satu dimensi dalam proses pembangunan bangsa adalah dimensi kependudukan. Kependudukan merupakan dimensi yang sangat dinamis. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Permasalahan-permasalahan yang sering timbul akibat jumlah penduduk yang besar dan mekanisme pembangunan yang kurang baik memunculkan paradigma pesimis (pessimistic theory) dan negatif mengenai pertumbuhan penduduk. Paradigma tersebut terbentuk karena banyak pihak hanya berfokus pada jumlah dan ukuran penduduk. Mereka berpandangan bahwa jumlah dan ukuran penduduk yang besar akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, sebenarnya terdapat hal penting yang perlu mendapat perhatian yaitu struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk menggambarkan performa ekonomi negara. Penduduk berusia produktif yang besar dan berkualitas serta memiliki kapasitas dalam skala ekonomi dapat berperan positif dalam pembangunan ekonomi. Simon Kuznet (1967) dan Julian Simon (1981) secara terpisah berpendapat bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkat pula persediaan kecerdasan manusia. Manusia-manusia cerdas dan produktif akan memanfaatkan dengan baik sumber daya alam yang ada di muka bumi serta mengembangkan teknologi sehingga output perekonomian akan meningkat. Pertumbuhan penduduk ditinjau bukan hanya dari segi penambahan, tetapi dari perubahan struktur umur penduduk. Perubahan struktur umur penduduk merupakan hasil dari terjadinya transisi demografi, sedangkan pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempercepat terjadinya transisi demografi. Hubungan ini diungkapkan pada International Conference on Population and Development's (ICPD) yang menyimpulkan bahwa penduduk memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan mendukung percepatan transisi demografi.

Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) September 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Natuna adalah sebanyak 81.495 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan. Dari 15 kecamatan tersebut, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Suak Midai. Pada Tabel.1.1 diketahui pula bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan jumlah penduduk perempuan, di mana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 41.890, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 39.605.

Rasio jenis kelamin merupakan salah satu indikator strategis yang menggambarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Rasio jenis kelamin Kabupaten Natuna adalah sebesar 105,77. Hal ini berarti terdapat 105 hingga 106 penduduk laki-laki di setiap 100 penduduk perempuan. Dengan mengetahui rasio ini, diperoleh informasi penting dalam penentuan kebijakan yang terkait dengan

gender.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Beserta Rasio Jenis Kelamin, 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
1	2	3	4	5
Midai	1.824	1.780	3.604	102,47
Suak Midai	887	852	1.739	104,11
Bunguran Barat	4.048	3.806	7.854	106,36
Bunguran Utara	2.349	2.176	4.525	107,95
Pulau Laut	1.182	1.137	2.319	103,96
Pulau Tiga	1.965	1.762	3.727	111,52
Bunguran Batubi	2.023	1.859	3.882	108,82
Pulau Tiga Barat	1.070	1.039	2.109	102,98
Bunguran Timur	14.188	13.618	27.806	104,19
Bunguran Timur Laut	2.770	2.602	5.372	106,46
Bunguran Tengah	1.898	1.779	3.677	106,69
Bunguran Selatan	1.800	1.549	3.349	116,2
Serasan	2.696	2.570	5.266	104,9
Subi	1.537	1.527	3.064	100,65
Serasan Timur	1.653	1.549	3.202	106,71
Natuna	41.890	39.605	81.495	105,77

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Hasil SP 2020

Jika kita cermati nilai rasio jenis kelamin menurut kelompok umur, maka akan ada pola yang berbeda antar kelompoknya. Pada kelompok umur 0-14 tahun, nilai rasio jenis kelamin diatas 100, yaitu sebesar 102,34. Dengan kata lain, penduduk laki-laki usia 0-14 tahun lebih banyak dibanding penduduk perempuan dengan usia yang sama. Para peneliti mempercayai bahwa penduduk laki-laki usia 0-14 tahun memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dibanding kelompok umur yang lainnya.

Sedangkan untuk kelompok umur 15-64 tahun, nilai rasio jenis kelamin adalah sebesar 107,07. Artinya, penduduk usia produktif laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Atau, dari setiap 100 penduduk perempuan usia produktif, ada sebanyak 107 penduduk laki-laki usia produktif. Informasi ini akan bermanfaat dalam perencanaan kebijakan, misalnya saja yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan keluarga berencana.

Sama halnya juga tercermin dari nilai rasio jenis kelamin untuk kelompok usia diatas 65 tahun nilainya hanya sebesar 107,71. Artinya, dari setiap 100 perempuan usia diatas 65 tahun, terdapat 107 hingga 108 orang laki-laki pada kelompok usia tersebut.

Tabel 1.2. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Natuna, 2020

Kelompok Umur	Rasio Jenis Kelamin
1	2
0-4	102,34
15-64	107,07
65+	107,71

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Hasil SP 2020

Salah satu permasalahan yang terkait dengan kependudukan adalah ketimpangan distribusi penduduk di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk di wilayah perkotaan. Padatnya penduduk di wilayah perkotaan berimplikasi pada timbulnya tantangan yang harus dihadapi seperti pengangguran, kebutuhan lahan pemukiman, kebutuhan pemenuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Di sisi lain, pada wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan menimbulkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja.

Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah dan komposisi tidak seimbang akan menjadi beban bagi pembangunan. Namun, apabila jumlah penduduk besar dan memiliki kualitas yang

baik maka akan menjadi modal dasar pembangunan.

Penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2020 sebesar 81.489 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan. Apabila ditinjau lebih mendalam, persebaran penduduk Kabupaten Natuna terkonsentrasi di beberapa wilayah, yaitu Kecamatan Midai, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Suak Midai, kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Serasan Timur, dan Kecamatan Serasan. Dari keseluruhan penduduk Kabupaten Natuna yang tersebar di 15 kecamatan, sekitar 34,12 persen penduduk tinggal di Kecamatan Bunguran Timur. Dimana jumlah penduduk di Kecamatan Bunguran Timur ada sebesar 27.806 jiwa.

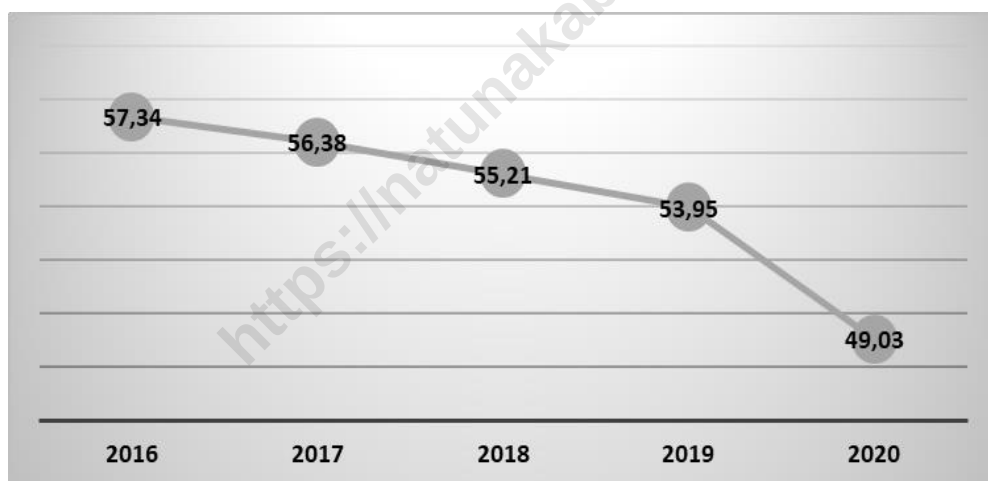
Tabel 1.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna, 2020

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	2	3
Midai	4,42	261,16
Suak Midai	2,13	139,68
Bunguran Barat	9,64	31,62
Bunguran Utara	5,55	11,15
Pulau Laut	2,85	61,61
Pulau Tiga	4,57	89,7
Bunguran Batubi	4,76	18,07
Pulau Tiga Barat	2,59	121,14
Bunguran Timur	34,12	195,62
Bunguran Timur Laut	6,59	17,94
Bunguran Tengah	4,51	42,78
Bunguran Selatan	4,11	14,28
Serasan	6,46	117,05
Subi	3,76	20,94
Serasan Timur	3,93	120,33
Natuna	100	40,56

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Hasil SP 2020

Analisis kependudukan, dapat ditinjau melalui komposisi penduduk. Dalam lingkup kajian demografi, komposisi penduduk dilihat dari dua dimensi yaitu kelompok umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi/rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu, dapat menggambarkan angka beban ketergantungan yaitu perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dan usia produktif (15-64 tahun).

Gambar 1.1. Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna 2016 – 2020



Sumber : BPS, Proyeksi SP 2010 dan Hasil SP 2020

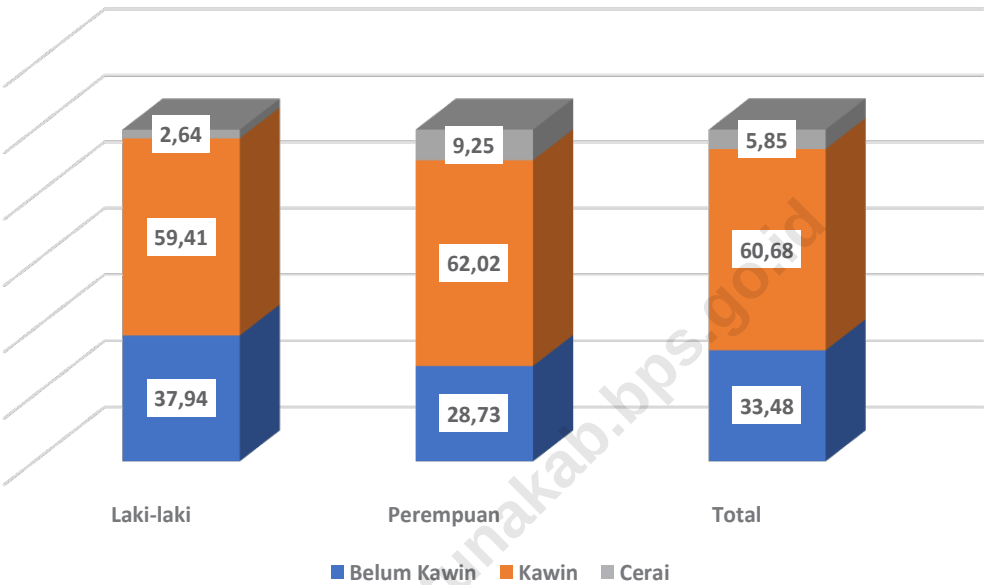
Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan komposisi penduduk di Kabupaten Natuna melalui angka ketergantungan dari tahun 2016 hingga 2020. Melalui grafik tersebut terlihat adanya kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Angka ketergantungan yang semakin menurun merupakan indikasi meningkatnya proporsi penduduk usia produktif, yaitu penduduk yang berusia 15-64 tahun. Penduduk usia produktif ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian untuk menanggung beban penduduk nonproduktif, yaitu penduduk berusia 0-14 tahun dan lebih dari 64 tahun. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk

2020, angka ketergantungan penduduk Kabupaten Natuna tercatat sebesar 49,03. Hal ini berarti bahwa setiap penduduk nonproduktif akan ditanggung oleh dua hingga tiga penduduk produktif. Proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar dibanding penduduk nonproduktif merupakan indikasi bahwa Kabupaten Natuna sedang mengalami bonus demografi. Momen ini merupakan kesempatan bagi Kabupaten Natuna untuk dapat mengoptimalkan peluang pertumbuhan ekonomi melalui penduduk produktif.

Perubahan jumlah penduduk suatu daerah pada waktu tertentu dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi. Fertilitas merupakan komponen demografi yang sifatnya menambah jumlah penduduk secara alami. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah kependudukan.

Fertilitas merupakan salah satu komponen demografi yang bersifat menambah jumlah penduduk secara alami karena berhubungan langsung dengan kemampuan seseorang melahirkan anak. Tentunya apabila tingkat fertilitas tidak bisa dikendalikan maka peledakan jumlah penduduk akan terjadi, yang pada gilirannya akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Jumlah anak yang dilahirkan dapat diatur melalui metode kontrasepsi. Penduduk menurut status perkawinan penting untuk diketahui karena terkait dengan tingkat fertilitas suatu daerah. Semakin besar penduduk yang berstatus kawin memungkinkan tingkat fertilitas yang tinggi di suatu daerah tersebut. Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang berstatus kawin, cerai hidup dan cerai mati. Pengertian kawin yang dicakup dalam survei ini adalah penduduk yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin secara sah/resmi tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai suami istri.

Gambar 1.2. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Pada gambar diatas tampak bahwa penduduk yang berstatus kawin persentasenya paling besar dari pada lainnya. Penduduk yang kawin jika dirinci menurut jenis kelamin persentasenya untuk laki-laki lebih kecil dibanding perempuan artinya lebih banyak penduduk perempuan yang sudah kawin dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki yang berstatus cerai lebih kecil dibanding perempuan. Pada tahun 2020 ada sekitar 2,64 persen penduduk laki-laki yang menduda, sedangkan penduduk perempuan yang menjanda sekitar 9,25 persen.

2

KESEHATAN & GIZI

Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Natuna 2020

65,06
tahun



62,84

AHH Menurut
Jenis Kelamin



66,67

Angka Kesakitan
Kabupaten Natuna 2020

11,14%



97,93%

Baduta pernah diberi ASI
dengan pemberian
ASI rata-rata selama

9,86
bulan



Cakupan
Imunisasi
Balita 2020



Salah satu dimensi penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas.

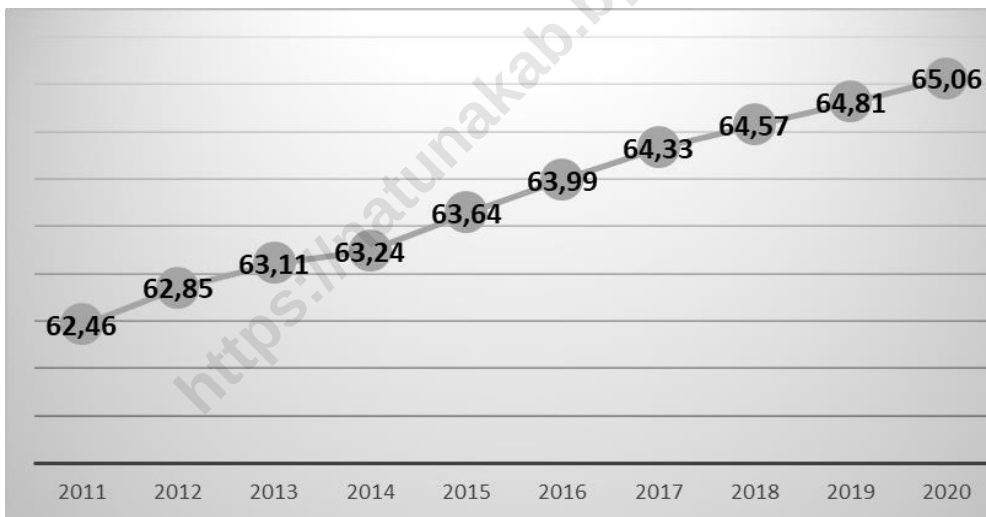
Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik. Implementasi pembangunan di bidang kesehatan secara fisik terlihat pada pembangunan prasarana fisik dan penyediaan tenaga kesehatan. Upaya ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara menyeluruh dalam rangka menurunkan angka kesakitan masyarakat, Angka Kematian Ibu dan Bayi, prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup. Keberadaan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan adanya bidan di desa akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk hidup sehat. Tenaga kesehatan tersebut harus memiliki kompetensi yang baik dan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang relatif mudah, murah dan merata.

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari besarnya Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. AHH yang lebih sering dikaji adalah AHH penduduk saat lahir. AHH saat lahir didefinisikan sebagai suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Selama sepuluh tahun terakhir (2011-2020), AHH Kabupaten

Natuna terus mengalami peningkatan dari 62,46 pada tahun 2011 menjadi 65,06 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa harapan seorang anak yang baru lahir untuk hidup lebih lama menjadi semakin tinggi karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat. Pada tahun 2020, AHH Kabupaten Natuna mencapai 65,06, angka ini menunjukkan bahwa anak yang baru lahir pada tahun 2020 diperkirakan akan hidup rata-rata berumur 65 hingga 66 tahun.

Gambar 2.1. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Natuna (tahun), 2011-2020

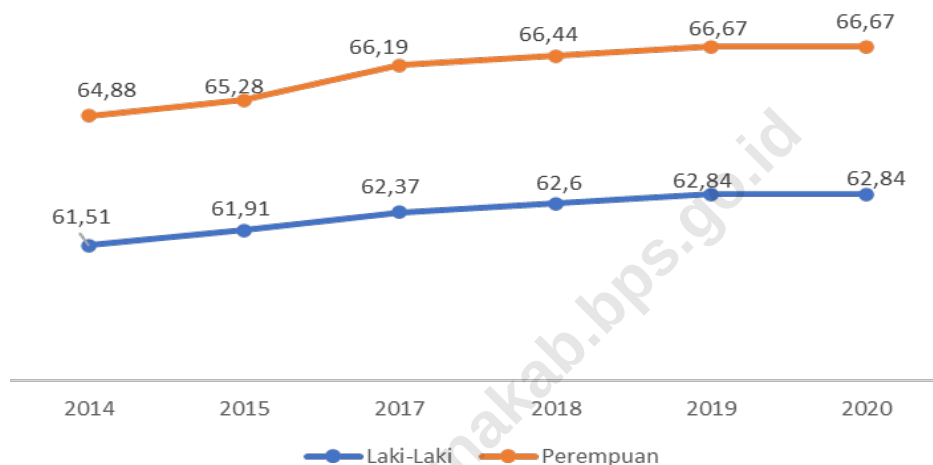


Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2011-2020

Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, maka secara umum tren AHL baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan selalu mengalami peningkatan dari periode 2014 hingga 2020. Sementara itu, besaran AHL menunjukkan adanya perbedaan level capaian antara AHL perempuan dan laki-laki. Level AHL penduduk laki-laki lebih rendah sekitar 4 tahun dibanding level AHL penduduk perempuan yang berarti bahwa perempuan lebih memiliki harapan berumur panjang dibandingkan laki-laki. Tahun 2020, AHL perempuan adalah

66,67 tahun, sedangkan laki-laki adalah 62,84 tahun.

Gambar 2.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Natuna Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perbedaan level atau gap yang terjadi pada AHH merupakan fenomena yang umum. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor biologis dan gaya hidup. Salah satu faktor biologis yang berpengaruh terhadap perbedaan ini adalah adanya hormon estrogen yang dimiliki perempuan. Hormon tersebut menjadi salah satu pelindung alami dari perkembangan penyakit jantung dan perubahan kondisi tubuh perempuan sepanjang hidupnya. Perubahan kondisi tubuh dari menstruasi, kehamilan, melahirkan, hingga menopause membuat tubuh perempuan secara internal lebih ‘tahan banting’. Sebaliknya, hormon testosteron yang dimiliki pria cenderung mendorong aktivitas yang lebih berisiko seperti merokok sehingga berpengaruh pada keselamatan hidupnya. Dilihat dari aspek gaya hidup, secara umum lebih banyak laki-laki yang bekerja dan beraktivitas diluar dibandingkan dengan perempuan. Padatnya aktivitas kerja yang dilakukan tentu berpotensi “mendatangkan” berbagai macam risiko, seperti stres, depresi, lingkungan yang tidak sehat, obesitas hingga ke penyakit-penyakit menular yang berbahaya.

Selain itu pekerjaan yang berisiko seperti supir, pekerja bangunan, dan lain-lain lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Akibatnya risiko kecelakaan kerja juga lebih banyak dialami laki-laki dibandingkan perempuan.

Selain Angka Harapan Hidup terdapat beberapa indikator yang menggambarkan derajat kesehatan di suatu wilayah diantaranya angka kesakitan. Angka kesakitan dapat diartikan bahwa keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, criminal atau hal lain.

Tabel 2.1. Angka Kesakitan Kabupaten Natuna menurut Jenis Kelamin, 2020

Karakteristik	Angka Kesakitan
1	2
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	10.68
Perempuan	11.62
Natuna	11.14

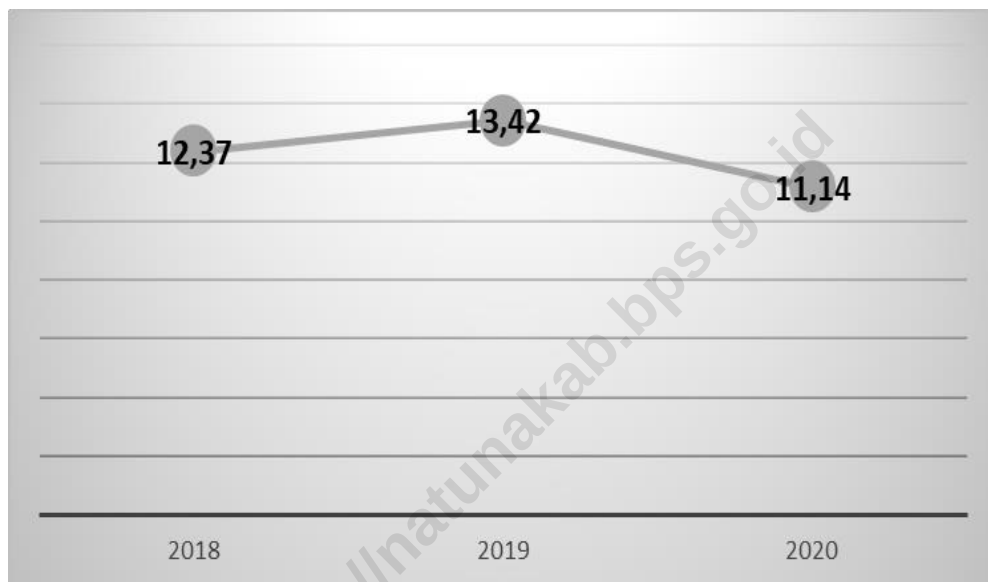
Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Hasil Susenas Maret tahun 2020 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Natuna mencapai 11,14 persen. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir. Angka Kesakitan penduduk perempuan tahun 2020 lebih tinggi dari penduduk laki-laki, masingmasing sekitar 11,62 persen dan 10,68 persen.

Sementara dilihat dari perkembangannya, terlihat bahwa pada tiga tahun terakhir (2018-2020) terjadi kenaikan dan penurunan penduduk Kabupaten Natuna yang mengalami keluhan kesehatan. Pada tahun 2018 ke 2019 terjadi kenaikan angka kesakitan dari 12,37 persen menjadi 13,42 persen naik sebesar 1,05 persen, sementara pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan

dari awalnya 13,42 persen menjadi 11,14 persen atau turun sebesar 2,28 persen.

Gambar 2.3. Perkembangan Angka Kesakitan Kabupaten Natuna (tahun), 2018-2020



Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2018-2020

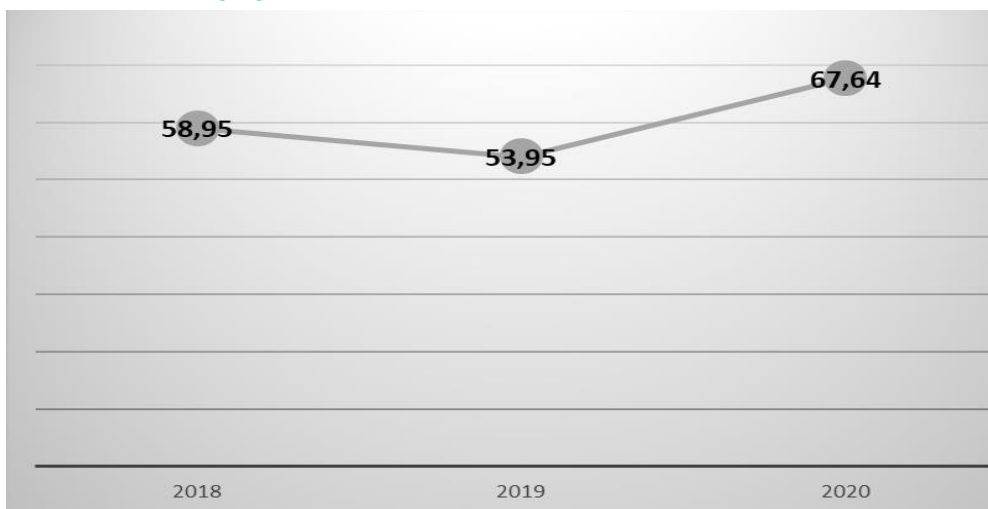
Sementara itu, persentase penduduk yang berobat jalan dengan menggunakan jaminan kesehatan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan gambaran mengenai kesadaran penduduk dalam menggunakan fasilitas kesehatan oleh penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2020, secara rata-rata, penduduk Kabupaten Natuna yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebesar 67,64 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, bahwa yang sering menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan adalah penduduk perempuan sebesar 70,27 persen sementara penduduk laki-laki sebesar 64,78 persen.

Tabel 2.2. Persentase Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Kabupaten Natuna, 2020

Karakteristik	Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan
1	2
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	64.78
Perempuan	70.27
Natuna	67.64

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Sementara dari perkembangannya terlihat bahwa pada tiga tahun terakhir (2018-2020) terjadi kenaikan dan penurunan penduduk Kabupaten Natuna yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Pada tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan penggunaan jaminan kesehatan dari 58,95 persen menjadi 53,95 persen atau turun sebesar 5 persen. sementara pada tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari awalnya 53,95 persen menjadi 67,64 persen atau naik sebesar 13,69 persen.

Gambar 2.4. Perkembangan Penduduk yang Berobat Jalan dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2018-2020

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2018-2020

Kunci kesuksesan pembangunan manusia dapat juga dilihat dari kehidupan balita yang sehat. Setiap balita berhak memperoleh kehidupan yang sebaik-baiknya karena pembentukan manusia dimulai sejak manusia tersebut masih berwujud janin di dalam kandungan, kemudian dilahirkan sebagai bayi lalu tumbuh menjadi balita. Masa balita (bawah lima tahun) sering disebut masa kritis perkembangan anak. Dalam usia ini otak anak mampu menyerap semua informasi yang diberikan sehingga dapat membentuk anak cerdas.

Optimalisasi tumbuh kembang anak di usia balita sangat dipengaruhi oleh kesehatannya sejak dalam kandungan. Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI). ASI sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Lebih dari itu, ASI mengandung zat-zat yang tidak terkandung dalam makanan lain.

Pada tahun 2020, sekitar 97,93 persen anak usia 0-23 bulan di Kabupaten Natuna pernah diberi ASI. Persentase tersebut cukup tinggi walaupun belum diidentifikasi apakah pemberian ASI tersebut secara eksklusif atau tidak. Tinggi rendahnya persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui secara tidak langsung menunjukkan kesadaran ibu dalam menyusui bayinya. Belakangan ini, pemberian ASI menjadi topik yang banyak dibicarakan masyarakat. Seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya ASI bagi kehidupan masa depan balita, kampanye pemberian ASI juga semakin marak. Bahkan hak dan kewajiban seorang ibu untuk menyusui bayinya

dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang.

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Karakteristik, 2020

Jenis Kelamin	Persentase Baduta Pernah diberi ASI	Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan)
1	2	3
Laki-laki	96,6	10,64
Perempuan	100	8,65
Natuna	97,93	9,86

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Selain ASI, indikator keluarga sehat berikutnya adalah bayi/balita mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan serta daya tahan tubuh balita terhadap suatu penyakit. Kekebalan terhadap penyakit ada yang bersifat alami (bawaan sejak lahir) dan buatan (melalui vaksin). Imunisasi adalah upaya pemberian kekebalan tubuh balita terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan/meneteskan vaksin ke dalam tubuh sehingga balita memiliki daya tahan terhadap suatu jenis penyakit yang sedang mewabah. Selain itu, tujuan diberikannya imunisasi pada anak adalah agar bayi yang relatif masih rentan terhadap penyakit dapat terhindar dari penyakit berbahaya, kecacatan atau kematian.

Perhatian pemerintah terhadap kesehatan balita melalui imunisasi dapat dilihat dari pemberian Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) di puskesmas yaitu Hepatitis B, BCG, Polio, DPT serta campak sebelum usia 1 tahun. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya.

Tabel 2.4. Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Karakteristik dan Jenis Imunisasi, 2020

Jenis Kelamin	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak/ MMR	Hepatitis B
1	2	3	4	5	6
Laki-laki	90,27	79,96	90,12	63,4	78,52
Perempuan	88,47	86,19	87,8	65,22	81,35
Natuna	89,39	83,01	88,99	64,29	79,91

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Kepedulian orang tua di Kabupaten Natuna mengenai pentingnya imunisasi bagi anak khususnya balita dapat dikatakan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari persentase pemberian imunisasi dasar pada balita yang belum mencapai 95 persen. Jenis imunisasi yang paling banyak dilakukan adalah BCG sebesar 89,39 persen. Sedangkan Imunisasi campak masih kurang yaitu dibawah angka 80 persen yaitu sebesar 64,29 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup berarti antara pemberian imunisasi pada balita laki-laki dan perempuan. Pada balita laki-laki, capaian pemberian imunisasi BCG dan Polio yang hanya lebih besar dari pemberian imunisasi perempuan.

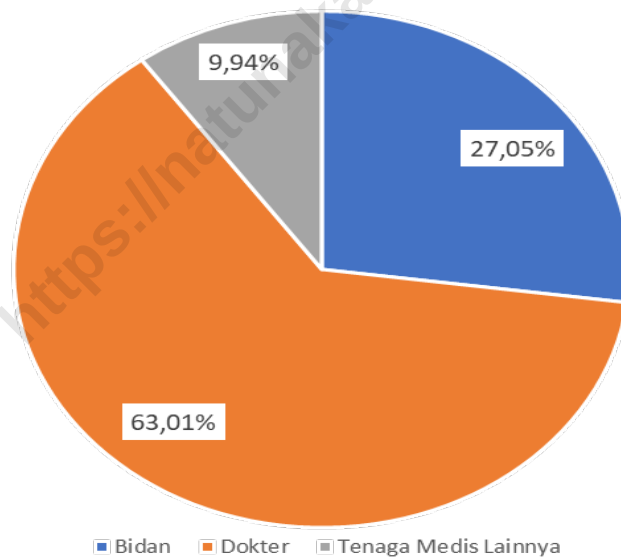
Selain itu, salah satu tolak ukur pembangunan kesehatan dari sisi supply adalah tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan secara merata. Namun demikian, ukuran pembangunan tersebut menjadi kurang berarti apabila tidak dilengkapi dengan ukuran pembangunan dari sisi demand, yaitu perilaku aktif masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas dan tenaga Kesehatan.

Perilaku aktif masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas dan tenaga kesehatan dapat dianalisis mulai dari proses persalinan. Pemilihan penolong persalinan merupakan upaya untuk mengurangi

risiko kematian ibu dan bayi. Hal ini disebabkan karena kematian ibu terbesar adalah pada kondisi pra persalinan. Sedangkan penyebab kematian bayi tertinggi adalah saat neonatal. Oleh karena itu kematian ibu dan bayi dapat dicegah dengan penolong persalinan yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Pada Tahun 2020, proses persalinan banyak dibantu oleh tenaga medis yaitu Bidan mencapai 63,01 persen. Persalinan yang dibantu oleh Dokter kandungan atau Dokter Umum ada sebesar 27,05 persen dan tenaga medis lainnya sebesar 9,94 persen.

Gambar 2.5. Distribusi Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dan Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Natuna, 2020



Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/ kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam

mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan. Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Misalnya di wilayah perkotaan, ketersediaan dan jarak menuju fasilitas kesehatan lebih terjangkau. Sebagai dampaknya, berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik.

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk yang tidak mampu tentunya sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit biasanya berada di ibukota kabupaten/kota, sedangkan untuk melayani masyarakat di pedesaan biasanya tersedia fasilitas pelayanan kesehatan berupa Puskesmas.

Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Natuna memiliki, 2 Rumah Sakit Umum; Puskesmas terdapat 14; Balai Kesehatan ada sebanyak 6; 118 Posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan, serta 20 Polindes.

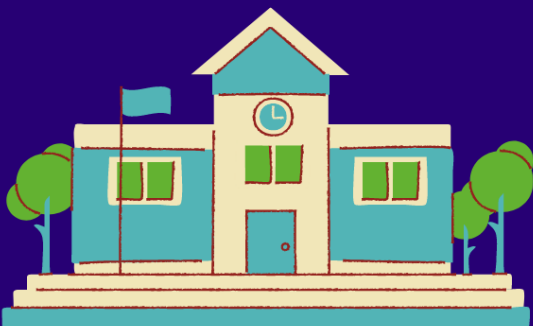
Tabel 2.5. Jumlah Fasilitas Kesehatan di kabupaten Natuna, 2020

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	2
Rumah Sakit	2
Puskesmas	14
Klinik/Balai Kesehatan	6
Posyandu	118
Polindes	20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna

3

PENDIDIKAN

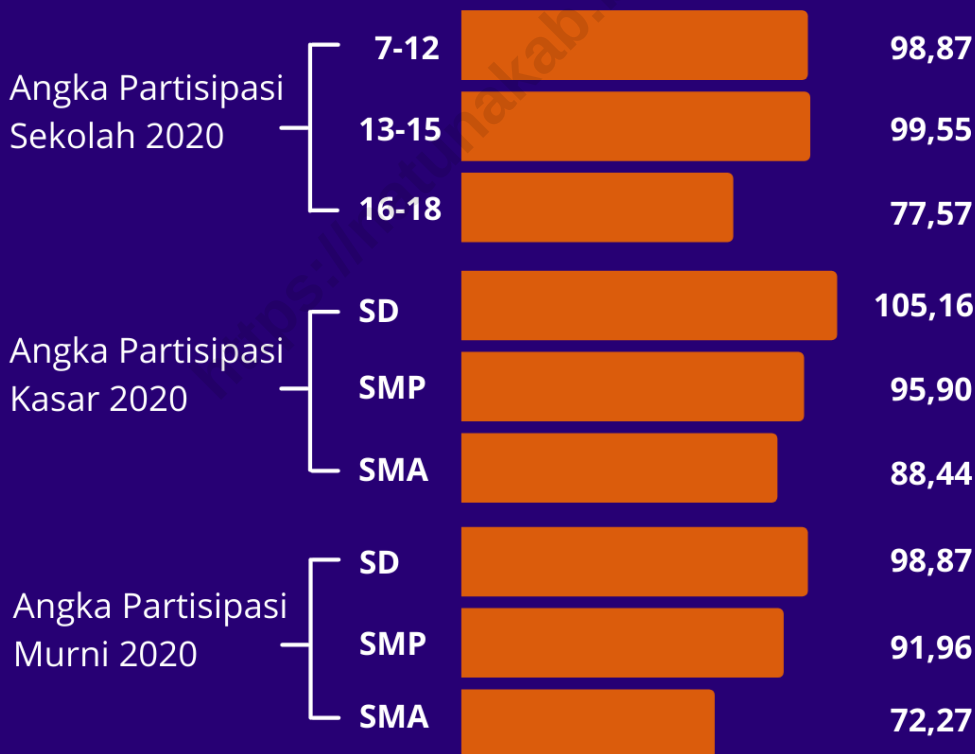


Harapan Lama Sekolah 2020

13,90
tahun

Rata-Rata Lama Sekolah 2020

8,73
tahun



Tingkat pendidikan merupakan modal dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut A Jauhar Fuad (2014), hasil pendidikan dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya hasil pembangunan dapat menunjang usaha pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan penduduk suatu wilayah maka akan semakin baik kondisi sosial ekonomi baik bagi dirinya, masyarakat maupun bangsa dan negara. Selain itu, tingkat pendidikan mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan suatu wilayah.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu Pendidikan.

Tingkat pendidikan merupakan modal dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut A Jauhar Fuad (2014), hasil pendidikan dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya hasil pembangunan dapat menunjang usaha pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan penduduk suatu wilayah maka akan semakin baik kondisi sosial ekonomi baik bagi dirinya, masyarakat maupun bangsa dan negara. Selain itu, tingkat pendidikan mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan suatu wilayah.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu Pendidikan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu investasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun negara. Tingkat pendidikan yang baik akan mengarahkan suatu negara menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan.

Pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah melalui peningkatan produktivitas, kapasitas manajerial dan kemampuan (skill), pembangunan dalam ilmu dasar, peningkatan teknologi, adaptasi teknologi dan inovasi (Ranis, Stewart, & Ramirez, 2000). Dengan demikian, semakin banyak manusia yang berpendidikan, semakin baik kualitas suatu bangsa.

Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial ekonomi, antar wilayah maupun antar jenis kelamin.

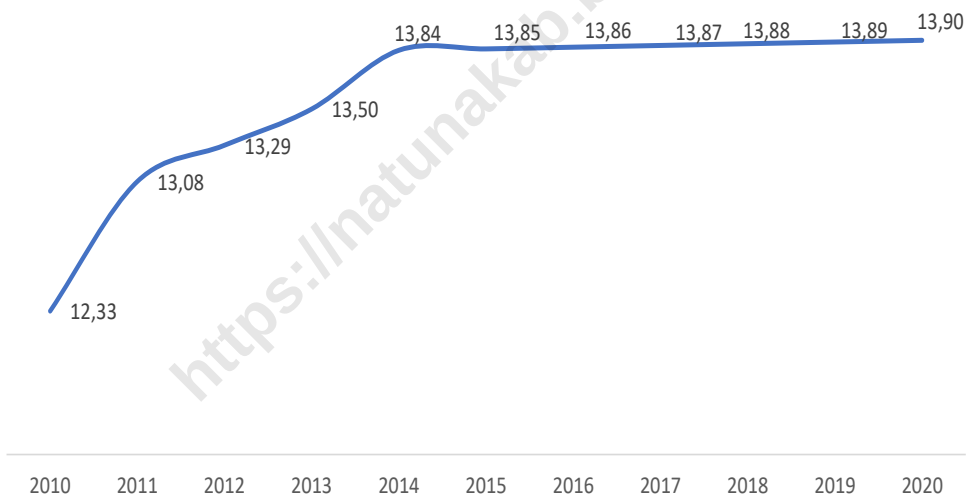
Pencapaian mengenai pendidikan ini tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Nawa Cita. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Besaran HLS menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan United Nation Development Program (UNDP). Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran

keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek.

Selama periode 2010 hingga 2020, HLS Kabupaten Natuna telah meningkat 1,57 tahun. HLS tahun 2020 masih tumbuh 0,07 persen. Dengan capaian 13,90. Artinya, anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I atau hampir selesai Diploma II. Meningkatnya indikator ini menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa peluang bersekolah di Kabupaten Natuna sudah dapat menuntaskan wajib belajar

Gambar 3.1. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Natuna, 2010-2020



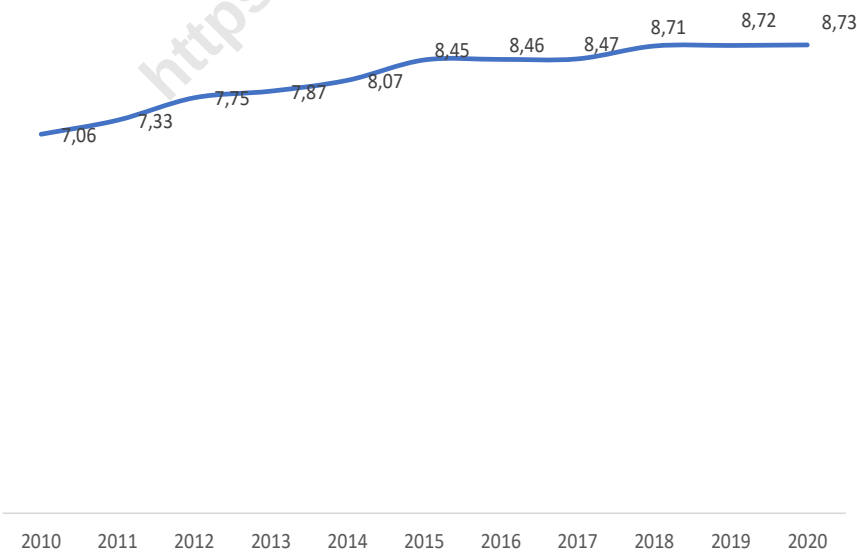
Sumber: Badan Pusat Statistik

Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. RLS digunakan pada IPM metode lama dan metode baru untuk mengukur dimensi pendidikan. Tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam definisi RLS ini. Pada IPM Metode Lama, RLS dihitung untuk penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan pada IPM Metode Baru, cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Salah satu upaya pemerintah yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada RLS adalah meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi. Terutama untuk jenjang pascasarjana yang memiliki peluang besar untuk penduduk usia di atas dua puluh lima tahun.

Gambar 3.2. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Natuna, 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

RLS Kabupaten Natuna pada masa periode 2010-2020 meningkat 1,67 tahun. RLS Kabupaten Natuna tahun 2020 sebesar 8,73 tahun yang artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Natuna usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau setara SLTP kelas II.

Situasi ini dapat berkontribusi pada tingkat partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APS menggambarkan proporsi penduduk yang masih sekolah dengan kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah oleh penduduk umur tertentu.

Tabel 3.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Natuna Tahun 2020

Kelompok Umur	APS
1	2
7-12	98.87
13-15	99.55
16-18	77.57

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Natuna hampir sempurna walaupun belum sepenuhnya berhasil. Tercatat bahwa APS pada penduduk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 99,55 persen. Dengan kata lain, masih terdapat 0,45 persen penduduk usia 13-15 tahun yang seharusnya sekolah ternyata tidak/belum pernah sekolah atau tidak bersekolah lagi. Pada penduduk kelompok umur 7-12 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SD sederajat, APS menunjukkan angka 98,87 persen. Pada kelompok umur 16-18 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMA sederajat sebesar 77,57 persen.

Indikator lain yang biasa digunakan untuk mengatur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menggambarkan proporsi penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK bisa bernilai lebih dari 100 persen karena ada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu ada yang diluar kelompok usia yang seharusnya.

Tabel 3.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Natuna Tahun 2020

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Kasar (APK)
1	2
SD	105.16
SMP	95.90
SMA	88.44

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Secara umum, APK untuk jenjang pendidikan SD sederajat pada tahun 2020 sebesar 105,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ada penduduk yang berumur diluar dari kelompok umur 7-12 tahun masih bersekolah di SD/sederajat. Hal ini umum terjadi karena masih ada penduduk yang berumur dibawah 7 tahun sudah bersekolah SD/sederajat, atau penduduk yang berusia diatas 12 tahun yang masih bersekolah SD/sederajat.

Pada jenjang pendidikan SMP/sederajat dan SMA/sederajat, APK pada tahun 2020 sebesar 95,90 dan 88,44 persen. Nilai dibawah 100 persen menunjukkan bahwa tidak semua penduduk pada kelompok umur tersebut bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai atau tidak bersekolah lagi.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak

pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah bersangkutan. Indikator APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu (usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya). APM akan mencapai nilai 100, jika seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Natuna Tahun 2020

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Murni (APM)
1	2
SD/Sederajat	98.87
SMP/Sederajat	91.96
SMA/Sederajat	72.27

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

APM pada jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini mencerminkan bahwa penduduk dengan umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Pada tahun 2020 APM SD/Sederajat di Kabupaten Natuna sebesar 98,87 persen, artinya tidak seluruh anak usia 7-12 tahun yang masih sekolah dan atau bersekolah pada jenjang SD/Sederajat, dan begitu pula untuk SMP/Sederajat atau SMA/Sederajat.

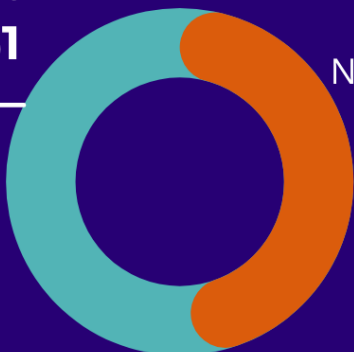
4

TARAF & POLA KONSUMSI

Persentase Pengeluaran

Makanan

51,31



Non Makanan

48,69

Rata-rata pengeluaran per kapita 2020

1.270.499

rupiah

Makanan

651.901

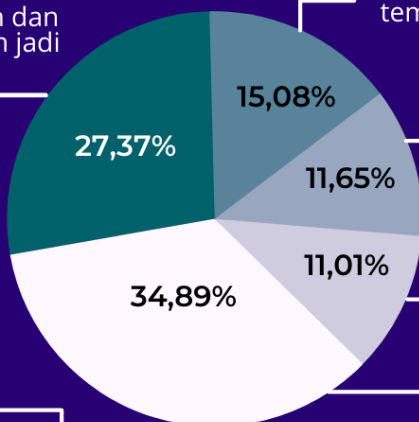
Non makanan

618.598

Komponen pengeluaran makanan terbanyak



Makanan dan minuman jadi



Rokok dan tembakau

15,08%

Ikan/udang/cumi/kerang



11,65%

Padi-padian



Komponen lainnya

11,01%

Perumahan dan fasilitas rumah tangga

52,38%

Komponen pengeluaran non makanan terbanyak



Aneka barang dan jasa



Pajak dan asuransi

8,06%

Komponen lainnya

13,89%

25,67%

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk/rumah tangga. Meskipun tingkat konsumsi penduduk bukan saja dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain tingkat harga, selera, gengsi, namun besarnya pengeluaran merupakan proksi terbaik untuk mengukur pendapatan.

Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/ keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

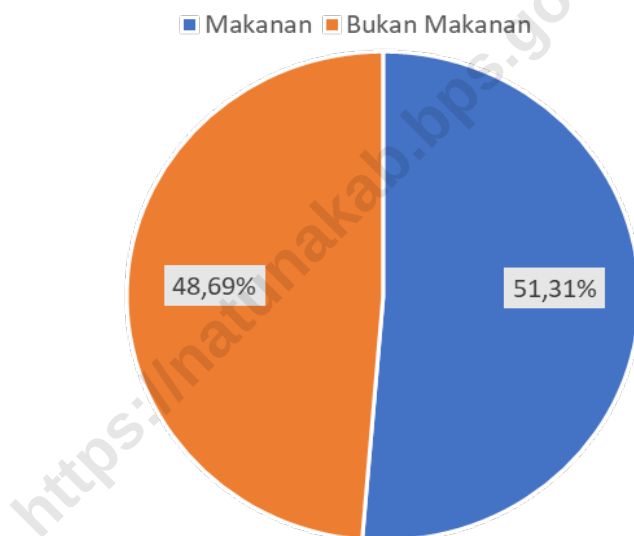
Dari segi budaya, pergeseran ini dikhawatirkan menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin menyukai hal-hal yang bersifat instan dan praktis. Selain itu, dari segi keamanan pangan, timbul kekhawatiran akan tingginya risiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi.

Secara umum, pola konsumsi dapat digambarkan melalui proporsi pengeluaran yang dibedakan menjadi pengeluaran makanan dan bukan makanan. Pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Terdapat kecenderungan bahwa dengan meningkatnya pendapatan, terdapat pergeseran pola konsumsi makanan ke bukan makanan.

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga

peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk karena perubahan komposisinya merupakan petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Gambar 4.1. Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Natuna (persen), 2020



Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Hasil Susenas 2020 menunjukkan bahwa secara umum pengeluaran penduduk Kabupaten Natuna masih didominasi oleh pengeluaran makanan. Dari pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kabupaten Natuna selama sebulan, 51,31 persennya digunakan untuk pengeluaran makanan, sedangkan untuk bukan makanan sebesar 48,69 persen.

Tabel 4.1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Natuna (Rupiah), 2019-2020

Jenis Pengeluaran	2019	2020
1	2	3
Makanan	600.095	651.901
Bukan Makanan	511.701	618.598
Jumlah	1.111.796	1.270.499

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Natuna mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita sebulan penduduk Natuna adalah Rp 1.111.796,- naik menjadi Rp 1.270.499,- pada tahun 2020.

Jika dilihat dari besaran komponen pengeluaran, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan meningkat dari tahun sebelumnya. Apabila dicermati secara lebih mendalam, maka komponen makananlah yang mendominasi pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 4.2. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Natuna (rupiah), 2019-2020

Komponen Pengeluaran	2019	2020
1	2	3
Padi-padian	11,72	11,01
Umbi-umbian	1,05	0,98
Ikan/udang/ cumi/kerang	11,34	11,65
Daging	1,96	2,56

Telur dan susu	5,93	6,38
Sayur-sayuran	7,74	8,17
Kacang-kacangan	1,29	1,37
Buah-buahan	4,53	3,93
Minyak dan kelapa	2,83	2,7
Bahan minuman	4,05	3,78
Bumbu-bumbuan	2,83	2,79
Konsumsi lainnya	2,69	2,24
Makanan dan minuman jadi	28	27,37
Rokok dan tembakau	14,07	15,08
Jumlah Makanan	100	100
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	54,85	52,38
Aneka barang dan jasa	26,43	25,67
Pakaian. alas kaki. dan tutup kepala	6,87	6,18
Barang tahan lama	4,71	6,2
Pajak. pungutan. dan asuransi	6,28	8,06
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	0,85	1,5
Jumlah Bukan Makanan	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2019-2020

Dari pengeluaran makanan dan minuman, terlihat pada tabel 4.2 bahwa pengeluaran makanan dan minuman jadi yang terbesar. Pada tahun 2019 sebesar 28 persen dan pada tahun 2020 sebesar 27,37 persen. Konsumsi makanan dan minuman jadi ini seperti pembelian di restoran, warung makan dan snack siap makan yang tersedia di minimarket atau warung. Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat lebih sering membeli makanan atau minuman jadi dibandingkan mempersiapkan makanan sendiri

Selain itu, pengeluaran konsumsi rokok termasuk terbesar ke dua. Pada tahun 2019 ada sebesar 14,07 persen dan di tahun 2020 sebesar 15,08 persen. Hal ini telah banyak terbukti bahwa pengeluaran

rokok merupakan pengeluaran pangan terbesar. Bahkan untuk penduduk Kabupaten Natuna, proporsi pendapatan yang digunakan untuk membelanjakan rokok lebih tinggi dibanding padi-padian yang hanya sekitar 11 persen. Kondisi tersebut cukup memprihatinkan terutama jika ditinjau dari aspek kesehatan. Rokok telah terbukti secara medis mengandung racun yang sangat berbahaya bagi tubuh. Tidak hanya itu, kebiasaan merokok sangat buruk karena tidak hanya mengancam kesehatan si perokok, tetapi juga mengancam kesehatan individu lain yang terpapar asap rokok. Kementerian Kesehatan menetapkan salah satu indikator keluarga sehat adalah tidak ada anggota rumah tangga yang merokok

Sedangkan persentase pengeluaran terkecil terletak pada konsumsi umbi-umbian yaitu 1,05 persen (2019) dan 0,98 persen (2020). Walaupun Kabupaten Natuna termasuk salah satu produksi Ubi terbesar, tetapi dari segi konsumsi hanya sedikit yang mengkonsumsinya. Hal ini kemungkinan, konsumsi yang dilakukan dalam bentuk ubi yang sudah menjadi makanan jadi atau bentuk olahan yang dibeli diwarung. Yang termasuk umbi-umbian disini adalah ketela pohon, ubi jalar, sagu, talas, kentang, geplek dan jenis umbi lainnya.

5

PERUMAHAN & LINGKUNGAN



82,5%

Rumah tangga di Kabupaten Natuna memiliki rumah sendiri

Indikator
Kualitas
Perumahan

Lantai bukan tanah

100%

Atap beton, seng, asbes

98,54%

Dinding terluas tembok dan kayu

94,82%



61,91%

Rumah tangga di Kabupaten Natuna mengonsumsi sumber air minum kemasan, isi ulang, dan ledeng

89,75%

Rumah tangga di Kabupaten Natuna menggunakan jamban sendiri



100%

Rumah tangga di Kabupaten Natuna memiliki sumber penerangan listrik



Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan. Manusia membutuhkan tempat berlindung dari panas, hujan, dan keberadaannya sangat penting untuk dapat terus bertahan hidup. Rumah merupakan tempat berlindung yang memberikan rasa aman bagi penghuninya. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang secara alamiah memiliki keinginan untuk hidup bersama orang lain dan bergantung satu sama lain, sehingga terbentuklah suatu komunitas yang terdiri dari beberapa bangunan rumah tinggal yang membentuk permukiman penduduk.

Rumah memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Pendidikan karakter yang ada di setiap rumah merupakan suatu upaya membangun manusia Indonesia yang berjiwa diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, rumah berperan dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa.

Begitu pentingnya peran rumah dalam pembentukan kepribadian bangsa menjadikan kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yang akan terus berkembang sesuai dengan tahapan dan siklus kehidupan. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang tinggal di daerah padat penduduk terutama di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan untuk masyarakat guna memperoleh rumah melalui penyelenggaraan perumahan, dan kawasan permukiman, serta keswadayaan masyarakat.

Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik juga tingkat kesejahteraan rumah tangga. Sebagai salah satu kebutuhan dasar, idealnya rumah dapat dimiliki oleh setiap keluarga, dengan kriteria rumah layak huni dan terjangkau yang berada di kawasan permukiman yang aman, harmonis, sehat, dan berkelanjutan.

Menurut Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, rumah layak

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan. Manusia membutuhkan tempat berlindung dari panas, hujan, dan keberadaannya sangat penting untuk dapat terus bertahan hidup. Rumah merupakan tempat berlindung yang memberikan rasa aman bagi penghuninya. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang secara alamiah memiliki keinginan untuk hidup bersama orang lain dan bergantung satu sama lain, sehingga terbentuklah suatu komunitas yang terdiri dari beberapa bangunan rumah tinggal yang membentuk permukiman penduduk.

Rumah memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Pendidikan karakter yang ada di setiap rumah merupakan suatu upaya membangun manusia Indonesia yang berjiwa diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, rumah berperan dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa.

Begitu pentingnya peran rumah dalam pembentukan kepribadian bangsa menjadikan kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yang akan terus berkembang sesuai dengan tahapan dan siklus kehidupan. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang tinggal di daerah padat penduduk terutama di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan untuk masyarakat guna memperoleh rumah melalui penyelenggaraan perumahan, dan kawasan permukiman, serta keswadayaan masyarakat.

Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik juga tingkat kesejahteraan rumah tangga. Sebagai salah satu kebutuhan dasar, idealnya rumah dapat dimiliki oleh setiap keluarga, dengan kriteria rumah layak huni dan terjangkau yang berada di kawasan permukiman yang aman, harmonis, sehat, dan berkelanjutan.

Menurut Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, rumah layak

huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat dan aman serta didukung sarana, prasarana, dan utilitas umum menjadi salah satu kriteria rumah layak huni.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Kondisi fisik bangunan merupakan salah satu penentu rumah sehat karena secara langsung dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup penghuninya. Pemenuhan kebutuhan akan kondisi rumah tinggal yang baik, memerlukan kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya rumah sehat. Selain itu, pemenuhan rumah sehat dengan kondisi fisik bangunan yang baik juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya, keadaan ekonomi rumah tangga akan sangat mempengaruhi kondisi fisik bangunan rumah tinggal. Semakin baik keadaan ekonomi rumah tangga, maka akan semakin baik juga kondisi fisik rumah yang ditempatinya.

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Berdasarkan data Susenas 2020, persentase rumah tangga Kabupaten Natuna yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya kenaikan. Pada tahun 2019, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 99,9 persen sedangkan di tahun 2020 sudah 100

persen penduduk Natuna menggunakan lantai bukan tanah.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah dengan atap beton, genteng, seng dan asbes, mencapai 97,5 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 98,54 persen pada tahun 2020. Sementara itu, penggunaan dinding terluas yang terbuat dari tembok dan kayu telah mencapai 94,35 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 94,82 persen pada tahun 2020. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat telah tinggal di dalam rumah yang memenuhi kriteria layak huni.

Tabel 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Natuna, 2019-2020

Indikator Kualitas Perumahan	2019	2020
1	2	3
Lantai Bukan Tanah	99,9	100
Atap beton, genteng, seng dan asbes	97,5	98,54
Dinding terluas tembok dan kayu	94,35	94,82

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2019-2020

Fasilitas Rumah Tinggal

Selain kualitas rumah tinggal, rumah yang ideal dapat diukur melalui kelengkapan fasilitas yang tersedia di dalam rumah. Fasilitas rumah yang lengkap akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik.

Setiap rumah tangga diharapkan mampu mengakses

air bersih karena air adalah sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan manusia. Dari sisi kesehatan, air bersih harus tersedia untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Air yang tidak bersih akan mengganggu kesehatan dan menimbulkan penyakit. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2020, rumah tangga di Kabupaten Natuna yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum baru mencapai 61,91 persen. Tetapi sudah cukup membaik bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 58,99 persen.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak tersanitasi akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti tifus, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat.

Saat ini, 89,75 persen rumah tangga yang ada di Kabupaten Natuna telah memakai jamban sendiri di rumahnya. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 91,97 persen. Hal ini dikarenakan adanya perubahan fungsi yang sebelumnya pemakaian sendiri menjadi pemakaian bersama dengan anggota rumah tangga tertentu.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020 sudah mencapai 100 persen rumah tangga telah menikmati fasilitas penerangan listrik. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 99,5 persen.

Tabel 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Natuna, 2019-2020

Indikator Fasilitas Perumahan	2019	2020
1	2	3
Air kemasan, air isi ulang, dan ledeng	58,99	61,91
Jamban Sendiri	91,97	89,75
Sumber Penerangan Listrik	99,5	100

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2019-2020

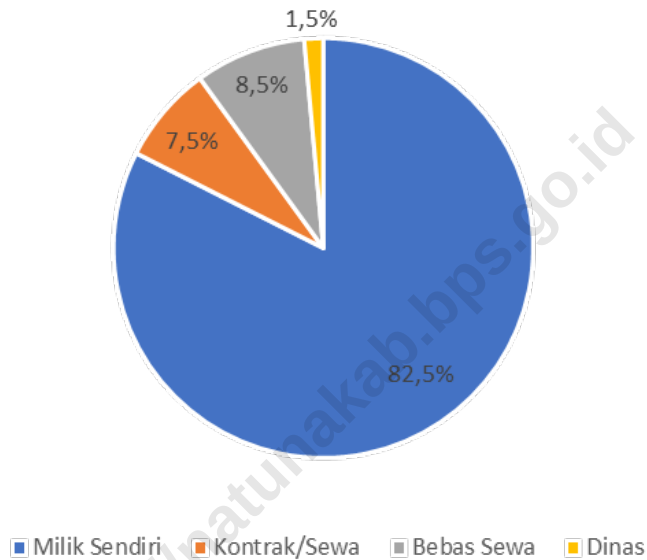
Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga. Rumah tangga yang berpenghasilan relatif tinggi memiliki kesempatan yang lebih dibandingkan dengan rumah tangga berpenghasilan rendah atau rumah tangga miskin untuk memiliki rumah sendiri dengan kondisi rumah yang lebih baik. Tingkat ekonomi rumah tangga menyebabkan perbedaan dalam perilaku masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan rumah, yaitu milik sendiri, kontrak atau sewa, menempati rumah tanpa mengeluarkan uang atau bebas sewa, menempati rumah dinas, atau lainnya seperti menempati rumah adat. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2020, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sudah cukup tinggi yaitu sebesar 82,5 persen, sisanya adalah bukan milik sendiri. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 (87,82 persen) terjadi penurunan persentase status kepemilikan rumah sendiri. Hal ini terjadi perubahan status

bangunan yang sebelumnya merupakan bangunan milik sendiri menjadi dikontrakkan dan bebas sewa.

Gambar 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, 2020



Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

6

KEMISKINAN



Garis Kemiskinan Kabupaten Natuna meningkat pada tahun 2020 menjadi

408.164

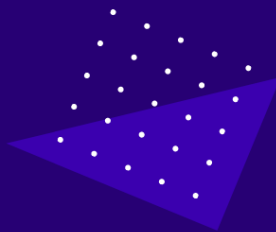
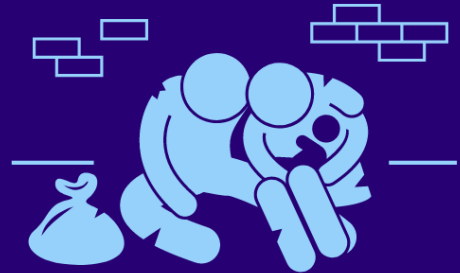
rupiah



3,4 jatuh di bawah
ribu jiwa garis kemiskinan

persentase penduduk miskin meningkat di tahun 2020 menjadi

4,43%



<https://natunakab.bps.go.id>

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Kemiskinan merupakan permasalahan global. Dunia internasional menetapkan pemberantasan kemiskinan sebagai salah satu target indikator perbaikan dunia yang tercantum dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) yang berakhir di tahun 2015 dan diteruskan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang baru dicanangkan dan akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030 dimana salah satu targetnya adalah "No Poverty" (menghapus segala bentuk kemiskinan).

Perkembangan Penduduk Miskin

Upaya pemberantasan kemiskinan suatu wilayah secara umum dapat dilihat dari perkembangan tingkat kemiskinan penduduk. Tingkat kemiskinan suatu wilayah mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Meskipun angka kemiskinan merupakan suatu pendekatan makro terhadap kesejahteraan penduduk, tetapi angka kemiskinan merupakan indikator yang paling tepat untuk menganalisis keberadaan penduduk termiskin dalam wilayah tersebut.

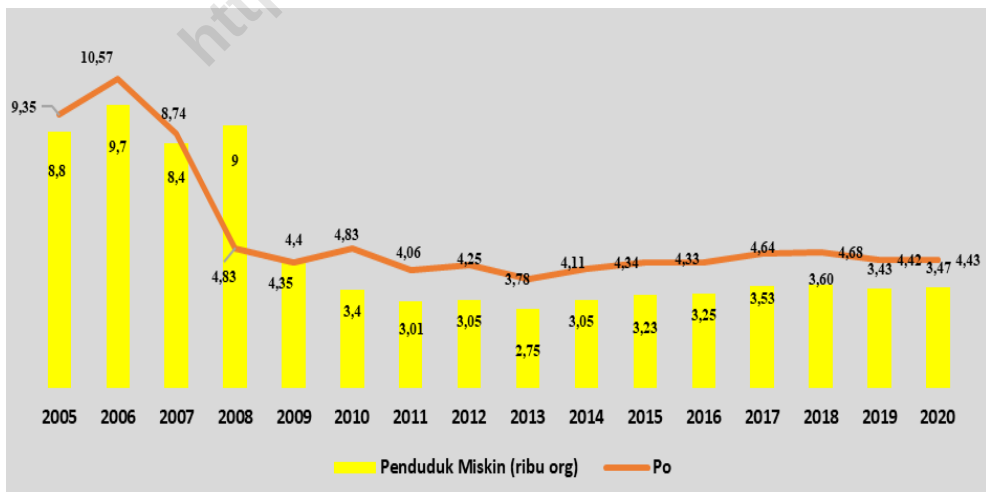
Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Kemiskinan merupakan permasalahan global. Dunia internasional menetapkan pemberantasan kemiskinan sebagai salah satu target indikator perbaikan dunia yang tercantum dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) yang berakhir di tahun 2015 dan diteruskan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang baru dicanangkan dan akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030 dimana salah satu targetnya adalah “No Poverty” (menghapus segala bentuk kemiskinan).

Perkembangan Penduduk Miskin

Upaya pemberantasan kemiskinan suatu wilayah secara umum dapat dilihat dari perkembangan tingkat kemiskinan penduduk. Tingkat kemiskinan suatu wilayah mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Meskipun angka kemiskinan merupakan suatu pendekatan makro terhadap kesejahteraan penduduk, tetapi angka kemiskinan merupakan indikator yang paling tepat untuk menganalisis keberadaan penduduk termiskin dalam wilayah tersebut.

Gambar 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Natuna, 2005-2020



Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2005-2020

Pada periode 2005-2020 terlihat adanya tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada tahun 2009, Kabupaten

Natuna mengalami pemekaran sehingga jumlah penduduk berkurang. Dari tahun tersebut pertumbuhan kemiskinan mulai mengalami perubahan yang signifikan. Pergerakan persentase penduduk miskin ini terlihat memiliki pola yang serupa dengan jumlah penduduk miskin.

Bila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,47 ribu jiwa dengan persentase penduduk sebesar 4,43 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,42 persen atau terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 44 jiwa.

Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kkal per kapita per hari. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, Pendidikan, Kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 6.1. Perkembangan Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2016-2020

Rincian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Garis Kemiskinan (Rp)	302.043	332.248	362.519	378.573	408.164
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,22	0,43	0,58	0,49	0,4
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,02	0,06	0,14	0,09	0,05

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2016-2020

Perkembangan Garis kwmiskinan (GK) dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan standar biaya kebutuhan dasar penduduk. GK Kabupaten Natuna mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 302.043,- dan di tahun 2020 menjadi Rp. 408.164,-.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Tetapi ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan digambarkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Secara umum, pada periode tahun 2016-2020 Indeks Kedalaman cenderung berfluktuasi dari 0,22 pada tahun 2016 menjadi 0,4 pada tahun 2020. Apabila ditinjau kondisi periode tahun 2016-2020, P1 paling tinggi berada pada tahun 2018 sebesar 0,58, tetapi setelah itu P1 yang semakin rendah. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi

miskin.

Indikator kemiskinan berikutnya adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan P2 selama periode tahun 2016-2020 memiliki pola yang hampir sama dengan P1. P2 berfluktuasi sama seperti perubahan dari P1. Ketika P1 naik, P2 cenderung naik di Kabupaten Natuna. Pada tahun 2016 sebesar 0,02 dan di tahun 2020 sebesar 0,05. Untuk P2 paling tinggi berada di tahun 2018 sebesar 0,14. P2 yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin semakin rendah.

<https://natunakab.bps.go.id>

7

SOSIAL LAINNYA



79,01%

Anggota rumah tangga di Kabupaten Natuna menggunakan telepon seluler



42,33%

Anggota rumah tangga di Kabupaten Natuna mengakses internet

Persentase rumah tangga yang mendapat perlindungan sosial



Persentase rumah tangga yang memiliki jaminan sosial

Pensiun/hari tua



12,56%

Asuransi/PHK



14,01%

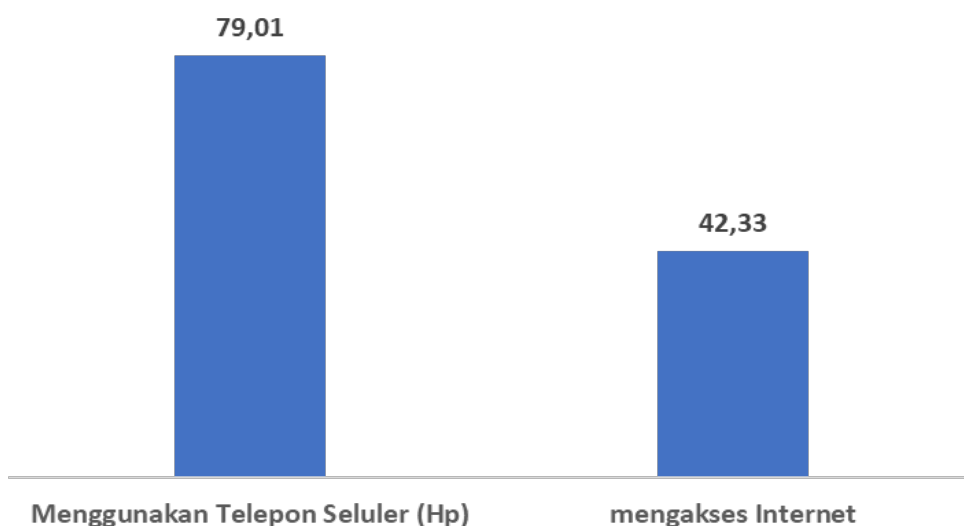


Kesejahteraan penduduk dapat dicerminkan melalui kegiatan-kegiatan sosial lainnya selain yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya. Aspek-aspek tersebut diantaranya adakah kepemilikan telepon seluler/nirkabel, akses terhadap internet, penerimaan program perlindungan sosial, kepemilikan jaminan sosial, dan kepemilikan aset.

Kemajuan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) merupakan alat yang sangat penting untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju. Kemajuan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan, penelitian, perdagangan, dan aspek kehidupan lainnya yang pada akhirnya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, terdapat 71,01 persen rumah tangga yang menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel. Namun, hanya ada 42,33 persen rumah tangga yang mengakses internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp). Hal ini terjadi karena belum meratanya pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi terutama internet di Kabupaten Natuna yang terkendala letak geografisnya yang kepulauan.

Gambar 7.1. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2020



Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial memberikan akses pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, termasuk akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan sosial juga dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan absolut yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin.

Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima , 2020

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
1	2
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako	7,23
Program Indonesia Pintar (PIP	1,92
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)*	6,32
Program Keluarga Harapan (PKH)	1,93

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin warga negaranya memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi

setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, terdapat 12,56 persen rumah tangga yang memiliki jaminan pensiun/hari tua. Selain itu, sebanyak 14,01 persen rumah tangga yang memiliki asuransi, meliputi asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja, dan pesangon PHK.

Tabel 7.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial, 2020

Jenis Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga
1	2
Jaminan Pensiun/hari tua	12,56
Asuransi/PHK	14,01

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Kepemilikan aset rumah tangga menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin banyak aset yang dimiliki maka semakin sejahtera rumah tangga tersebut.

Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Jenis Aset, 2020

Jenis Aset	Persentase Rumah Tangga
1	2
Aset Fasilitas Rumah Tangga	69,26
Aset Transportasi	88,67

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Susenas Maret 2020

Dari hasil Susenas 2020, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Natuna memiliki aset transportasi yaitu sebesar 88,67 persen. Mayoritas

masyarakat di Kabupaten Natuna memiliki sepeda motor, karena tidak banyaknya kendaraan umum dengan trayek sehingga masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Aset kendaraan terbesar kedua yaitu perahu motor, karena kondisi geografis Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah kepulauan sehingga penduduknya banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan memiliki perahu motor, kemudian perahu, dan yang terakhir mobil. Sementara itu, sebesar 69,26 persen rumah tangga memiliki aset fasilitas rumah tangga yang meliputi lemari es/kulkas, AC, pemanas air, televisi, tabung gas/elpiji, dan telepon rumah.



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://natunakab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA

JL. HR SOEBRANTAS, SUAL

RT 01 RW 05, RANAI, BUNGURAN TIMUR

<http://natunakab.bps.go.id> Email: bps2103@bps.go.id

